

OMBUDSMAN AKAN TELUSURI DUGAAN SISWA FIKTIF

Kamis, 28 November 2019 - Muhammad Dany Yulizar Iqbal

Palu, Metrosulawesi.id - Ombudsman Perwakilan Sulteng berencana menelusuri kasus dugaan adanya siswa fiktif di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Irwan Lahace.

"Siapa pun oknum yang terlibat dalam dugaan siswa fiktif itu, harus diberi sanksi tegas," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah, melalui ponselnya, Rabu, 27 November 2019.

Sofyan mengatakan, jika dugaan siswa fiktif benar Ombudsman bakal minta oknum yang terlibat ditindak tegas. Kemudian juga jika datanya telah lengkap, Ombudsman akan telusuri terkait dugaan itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulteng, Irwan Lahace, mengatakan, dugaan siswa fiktif itu diketahui setelah melakukan sidak ke Kecamatan Bulagi, Bangkep, baru-baru ini. Sidak yang dilakukannya berawal dari kecurigaan atas laporan jumlah siswa di kecamatan tersebut.

"Saya tidak mau hanya dapat laporan, saya turun ke Kecamatan Bulagi, di sana ada tiga SMK dan dua SMA, semuanya berstatus negeri. Salah satu SMK saya dapati siswanya hanya 13 orang, padahal laporannya ada 70 siswa, kemudian ke tempat lain saya dapat hanya 20-an siswa," ungkap Irwan.

Belakangan masalah tersebut menjadi polemik antara Kadis Dikbud Sulteng Irwan Lahace dengan Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr Hatija Yahya.

Kepada Metrosulawesi, Irwan Lahace, menyatakan bahwa dirinya bersama Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr Hatija Yahya, terjadi miskomunikasi, soal dugaan siswa fiktif yang didapatkannya pada saat sidak di beberapa sekolah pada Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).

"Memang waktu saya sidak di Bangkep itu didampingi oleh Ibu Hatija, tetapi waktu penjelasan guru yang mewakili kepala sekolah, saya ada melihat ruangan di sebelah. Sehingga saya tidak mendengar itu penjelasannya guru itu, sebab kepala sekolahnya sakit. Rupanya sebagian siswa ada keluar mengikuti Praktik kerja industri (Prakerin)," jelas Irwan, melalui ponselnya.

Namun kata Irwan, pihaknya tidak langsung percaya begitu saja, olehnya itu pihaknya tetap mengirimkan surat ke sekolah-sekolah itu untuk meminta pertanggungjawaban mutlak. Artinya surat yang ditandatangani itu betul-betul selesai.

"Di saat menjelaskan guru yang mewakili kepek, saya lagi memeriksa ruangan yang lain. Namun ibu Hatija rupanya mendapatkan penjelasan bahwa ada yang praktik di luar. Tetapi saya tidak mendapatkan penjelasan itu. Olehnya itu tindakan sekarang yang saya lakukan menyurat ke sekolah-sekolah, untuk mereka membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak," ujarnya.

Reporter: Moh Fadel
Editor: Udin Salim